

**LAPORAN DELEGASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KE LUAR NEGERI DALAM RANGKA MENGHADIRI
PARLIAMENTARY HEARING AT THE UNITED NATIONS
NEW YORK – AMERIKA SERIKAT, 6-7 DESEMBER 2012**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak tahun 2003, *Parliamentary Hearing* di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York diselenggarakan tiap tahun sebagai forum diskusi antara Pejabat Tinggi PBB dengan perwakilan negara-negara anggota, para pakar dan masyarakat sipil serta melibatkan pula para anggota parlemen yang merupakan bagian dari delegasi nasional negara anggota pada Sidang PBB.

Annual Parliamentary Hearing Tahun 2012 mengambil tema *A road less travelled: parliamentary approaches to conflict prevention, reconciliation and peace building* dan akan menggali lebih jauh hal-hal terkait dengan topik berikut ini:

- Apa saja kondisi optimal dan persyaratan institusional bagi parlemen untuk memajukan peran aktif dan pencegahan konflik dan rekonsiliasi? Bagaimana PBB dan IPU dapat mendukung kondisi-kondisi tersebut?
- Bagaimana parlemen (dan IPU) mendukung PBB, misi-misi PBB di lapangan, Komisi Pengembangan Perdamaian PBB, dan Dewan HAM PBB?
- Bagaimana anggota parlemen dapat membantu menengahi konflik (mediasi) baik pada tingkat parlemen maupun bekerja sama dengan PBB?
- Bagaimana parlemen dapat menghubungkan mekanisme keadilan transnasional dan kebenaran dengan mekanisme rekonsiliasi?
- Apa yang dipikirkan parlemen tentang reformasi pokok yang diperlukan untuk menjamin pembuatan keputusan yang lebih demokratis terhadap resolusi konflik di PBB?

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENGIRIMAN DELEGASI

Maksud dari pengiriman Delegasi DPR-RI ke *Annual Parliamentary Hearing at the United Nations* adalah untuk mendapatkan pengetahuan *best practices* dari negara lain dan memberikan masukan kepada forum serta memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

Sedangkan tujuan dari pengiriman delegasi DPR-RI adalah:

- Forum penting bagi anggota parlemen untuk berdiskusi dengan pihak Eksekutif dan lapisan masyarakat sipil lainnya dalam mencari solusi terhadap topik-topik global
- Mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat global dan dalam kerangka multilateral
- Turut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi serta keadilan sosial di tingkat internasional

C. DASAR HUKUM PENGIRIMAN DELEGASI

Pengiriman delegasi DPR-RI ke *Parliamentary Hearing at the United Nations* berdasarkan atas:

- 1- Surat Undangan dari Presiden IPU, H.E. Mr. Abdelwahad Radi, dan Presiden Sidang Umum ke-67 PBB, HE Mr. Vuk Jeremic, tanggal 1 Oktober 2012
- 2- Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PIMP/II/2012-2013 tanggal 23 November 2012 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Untuk Menghadiri *Parliamentary Hearing at the United Nations* di New York – Amerika Serikat tanggal 4-8 Desember 2012

D. SUSUNAN DAN KOMPOSISI DELEGASI

Sesuai surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PIMP/II/2012-2013, susunan dan komposisi Delegasi DPR-RI ke *Parliamentary Hearing* sebagai berikut:

1. Ir. H. Roestanto Wahidi D., MM -F-PD/A- 467 -Ketua Delegasi
-Anggota Komisi V
-Anggota BKSAP
2. Puan Maharani -F-PDIP/A-360 -Anggota Delegasi
-Anggota Komisi I
-Anggota BKSAP

II. AGENDA SIDANG

Sidang berlangsung dua hari yaitu tanggal 6-7 Desember 2012 dari pukul 10.00 am s.d. 17.30 pm dengan rincian sebagai berikut:

Kamis, 6 Desember 2012

- 10.00 – 13.00 Sesi I : Overview and General Questions
15.00 – 18.00 Sesi II : Learning From Experiences
-Kasus I : Kenya
-Kasus II : Sierra Leone

Jum'at, 7 Desember 2012

- 10.00 – 13.00 Sesi III : Learning From Experiences
-Kasus III : Timor Leste
15.00 – 18.00 Sesi IV : Summary of Findings
-Parliamentary Motion

III. JALANNYA PERSIDANGAN DAN PARTISIPASI DELEGASI DPR-RI DALAM SIDANG

Delegasi DPR-RI rajin menghadiri acara-acara sidang yang telah ditetapkan dalam agenda sidang dan program sidang sebagai berikut:

1. Upacara Pembukaan

Sidang dibuka pada tanggal 6 Desember 2012 pukul 10.00 dengan penyampaian pidato sambutan (*welcome remark*) dengan tema PBB dan IPU bekerja bersama untuk menggali peran parlemen dalam mewujudkan perdamaian. Pidato Sambutan disampaikan oleh Presiden IPU, H.E. Mr. Abdelwahad Radi, dilanjutkan Wakil Presiden Sidang Umum PBB, H.E. Rodney Charles, dan Wakil Sekretaris Jenderal PBB, H.E. Jan Eliasson.

Parliamentary Hearing at the United Nations Tahun 2012 dihadiri oleh kurang lebih 180 Anggota Parlemen dari 130 negara Anggota IPU, para pejabat tinggi PBB, para pakar dan perwakilan negara-negara anggota PBB lainnya.



Suasana Upacara Pembukaan Parliamentary Hearing at the United Nations Tahun 2012 di New York

2. Sesi I : Overview dan General Questions



Delegasi DPR-RI yaitu Ir. H. Roestanto Wahidi D.,MM (F-PD/A467) dan Puan Maharani F-PDIP/A-360 sedang mengikuti persidangan Parliamentary Hearing at the United Nations Tahun 2012 di New York

Setelah Upacara Pembukaan selesai kemudian dilanjutkan Sesi I. Persidangan Sesi I menggunakan format wawancara (*interview*) bergaya Forum Ekonomi Dunia Davos. Dengan bantuan moderator, para tokoh berpengalaman dan pakar diundang untuk menyampaikan paparan informal tentang tantangan utama dari tiga topik yang dibahas dalam *Parliamentary Hearing* yaitu *conflict prevention, reconciliation* dan *peace building*.

Wawancara kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab oleh peserta. Tidak ada presentasi resmi dalam Sesi ini.

Dipandu moderator Mr. James Traub, jurnalis dan pengarang buku, ada lima Pembicara yang diundang dalam Sesi I yaitu:

1. H.E Mr. Ranko Vilovic, Permanent Representative of the Republic of Croatia to the United Nations/Vice Chair of the UN Peace Building Commission.
2. Ms. Marta Ruedas, Deputy Director of Bureau for Crisis Prevention and Recovery UNDP
3. Ms. Saraswati Menon, Director of the Policy Division of UN Women

4. Mr. Taye-Brook Zerihoun, Assistant Secretary-General for Political Affairs
5. Ms. Pauline Baker, President Emeritus of the Fund for Peace

Sesi I membahas pertanyaan-pertanyaan kunci (*leading questions*) sebagai berikut:

- Apa definisi dari konsep *conflict prevention, reconciliation, peace building*? Bagaimana tiga konsep tersebut saling terkait?
- Apa saja yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan atas upaya-upaya untuk mencegah konflik, mencapai rekonsiliasi, dan membangun perdamaian yang stabil?
- Apakah PBB sudah memiliki kelengkapan yang cukup dari segi kelembagaan dan dari segi operasional untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut?
- Haruskah PBB semakin melibatkan parlemen dalam kegiatan-kegiatan mediasi perdamaian dan rekonsiliasi nasional?
- Bagaimana masyarakat internasional dan aktor-aktor nasional seperti parlemen dapat saling mendukung satu sama lain di bidang perdamaian?
- Bagaimana penjelasan terhadap rendahnya keterwakilan perempuan di bidang misi-misi mediasi dan negosiasi perdamaian?

Dari wawancara tersebut diperoleh kesimpulan *conflict prevention, reconciliation, peace building* merupakan konsep yang saling terkait satu sama lain, masing-masing bukanlah kata magic namun memerlukan proses panjang, dan keberhasilannya tidak semata-mata tergantung pada *political will* para pemimpin politik namun harus didukung pula oleh lingkungan nasional dan lingkungan internasional yang kondusif bagi terbukanya dialog dan keterlibatan semua pihak.

3. Sesi II Learning From Experience (Kasus I -Kenya)

Persidangan Sesi II menggunakan format "Davos style", tanpa presentasi resmi dan moderator mengarahkan jalannya diskusi interaktif antara pembicara dengan para peserta sidang. Sebelum persidangan dimulai, dilakukan pemutaran presentasi video terlebih dahulu.

Dipandu oleh moderator Ms. Gayle Lemmon, jurnalis dan pengarang buku, ada empat pembicara yang diundang pada Sesi II yaitu:

1. Hon. Kenneth Marende, Ketua Parlemen Kenya
2. Hon. Melege Traore, Anggota Parlemen Burkina Faso
3. Mr. Peter Gastrow, Director Programs and Senior Fellow, International Peace Institute

Sesi ini menggambarkan kasus parlemen yang memainkan peran pro-aktif dalam pencegahan konflik terkait dengan proses pemilihan umum. Pertanyaan-pertanyaan kunci yang dibahas adalah:

- mekanisme apa yang dapat dibentuk oleh parlemen dalam mencegah konflik dengan kekerasan sebagai hasil dari proses politiknya sendiri? mekanisme apa yang dapat dilakukan oleh parlemen dalam menghadapi perkembangan politik eksternal terhadap proses institusionalisasi?

- langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh parlemen untuk mencegah konflik dengan kekerasan melalui proses pembuatan keputusan yang merangkul semua pihak (inclusive)?
- apa pentingnya upaya-upaya mediasi oleh masyarakat internasional bagi pembentukan stabilitas politik? bagaimana proses itu dapat diperkuat melalui keterlibatan yang lebih besar dari parlemen?
- langkah-langkah apa yang diambil oleh Parlemen Kenya dalam mencegah kekerasan terkait dengan pemilu tahun 2013?

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kenya saat ini telah dalam kondisi siap untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilu tahun 2013 dan merasa yakin bahwa tidak akan terjadi pukulan balik paska pembangunan perdamaian. Mekanisme di Parlemen Kenya telah terbentuk dengan baik dan Kenya mendapatkan dukungan internasional bagi penyelenggaraan Pemilu 2013.

4. Sesi II Learning From Experience (Kasus II -Sierra Leone)

Persidangan Sesi II menggunakan format "gaya Davos", tanpa presentasi resmi dan moderator mengarahkan jalannya diskusi. Persidangan dimulai dengan pemutaran video, kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara pembicara dengan para peserta sidang.



Penayangan video sebelum general debate dimulai

Dipandu moderator Ms. Gayle Lemmon, jurnalis dan pengarang buku, ada empat pembicara yang diundang pada Sesi II yaitu:

1. Hon. Edward Amin Soloku. mantan anggota parlemen Sierra Leone
2. HE Mr. Shekou M. Touray, Permanent Representative of Sierra Leone to the United Nations
3. Mr. Eloho Ejeviome Otobo, Director and Deputy Head of Peace Building Support Office
4. Mr. Lansana Gberie, Research Analyst, Security Council Report

Sesi ini menggambarkan kasus parlemen yang memainkan peran pada tahap rekonsiliasi. Pertanyaan-pertanyaan kunci yang dibahas adalah:

- Bagaimana parlemen dapat memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan konstituen dan masyarakat sipil?
- Apalagi yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional untuk meningkatkan hubungan antara parlemen dan rakyatnya?
- Bagaimana partai politik dapat berkerjasama secara lebih efektif? Keuntungan apa yang dapat diberikan oleh partai politik untuk menciptakan platform kebijakan yang lebih kuat yang tidak berdasarkan pada identitas budaya dan etnis?
- Tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh negara dalam upaya-upaya rekonsiliasi ketika aliran bantuan internasional menurun?

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi Sierra Leone pada tahap rekonsiliasi belum berhasil dengan baik, bahkan dapat dikatakan bahwa bantuan internasional tidak bersungguh-sungguh menginginkan perdamaian terwujud di Sierra Leone serta mendapatkan kesan kondisi tidak pasti sengaja dibiarkan berlarut-larut di Sierra Leone.

5. Sesi III Learning From Experience (Kasus III -Timor Timur)

Pada program awal, Sesi III membahas kasus parlemen yang memainkan peran dalam pembangunan perdamaian (*peace building*). Persidangan Sesi III menggunakan format "Davos style", tanpa presentasi resmi dan moderator mengarahkan jalannya diskusi interaktif antara pembicara dengan para peserta sidang. Sebelum wawancara dimulai akan diputar presentasi video.

Sesi III akan membahas pertanyaan-pertanyaan kunci yaitu:

- Apa saja yang dapat membuat kerjasama yang efektif untuk kemajuan nasional diantara berbagai partai politik yang berbeda dengan berbagai ideologi yang berbeda?
- Langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mencegah kemungkinan terjadinya pukulan balik akibat dari berakhirnya misi perdamaian PBB?

Namun karena adanya protes keras dari Indonesia dan Timor Leste maka Kasus III-Timor Leste berhasil dibatalkan untuk dibahas dan digantikan dengan pembahasan kasus Cote d'Ivoire tanpa didahului presentasi video.

Dipandu oleh moderator Mr. Nicholas Walbridge, Research Analyst of Security Council Report, Sesi III menghadirkan dua pembicara yaitu:

1. Honorable Guillaume Kibgafory Soro, Ketua Parlemen Cote d'Ivoire
2. Mr. Anders B. Johnsson, Sekretaris Jenderal IPU

Honorable Guillaume Kibgafory Soro, Ketua Parlemen Cote d'Ivoire, menyampaikan pemaparan informal tentang proses pembangunan perdamaian di Cote d'Ivoire pada pemilihan umum 2002 yang berhasil berkat keterlibatan dan bantuan dari PBB. Pada masa konflik, PBB bekerja sama dengan lembaga nasional Cote d'Ivoire telah mengorganisir dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis melibatkan seluruh warga negara, yang independen, yang berdasarkan norma standar internasional, dan yang sesuai dengan keinginan global. Berkat PBB maka Cote d'Ivoire dapat terlepas dari perang, dan membentuk pemerintahan sistem presidensial dengan tiga kekuatan pemisahan kekuasaan yang menjadi elemen penting. Debat-debat di parlemen dapat menjadi forum rekonsiliasi nasional.

Honorable Guillaume Kibgafory Soro juga menyampaikan bahwa organisasi regional seperti Pan Africa tidak berperan banyak selama konflik berlangsung di Cote d'Ivoire, justru PBB yang lebih berperan aktif menggalang solidaritas internasional sejak masa konflik hingga pembangunan perdamaian. Selain itu ditegaskan pula bahwa PBB tidak melakukan intervensi di Cote d'Ivoire melainkan masyarakat Cote d'Ivoire yang meminta PBB untuk membantu proses dialog nasional.

Pembicara kedua adalah Mr. Anders B. Johnsson, Sekretaris Jenderal IPU, yang menyampaikan paparan tidak resmi tentang peran IPU dalam memperkenalkan peran parlemen dalam konflik dan peran IPU dalam proses perdamaian di beberapa negara, seperti Kamboja dan Burundi. IPU telah memainkan peran dalam proses mediasi semasa rekonsiliasi di Kamboja hingga Kamboja berhasil menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Di Burundi, IPU telah membantu parlemen Burundi tumbuh berkembang dan mendidik masyarakat Burundi tentang peran parlemen. IPU juga berkerjasama dengan Parlemen Burundi melakukan konsultasi dengan Eksekutif Burundi dan meminta Burundi agar memperkuat parlemennya.

Setelah wawancara selesai, persidangan dilanjutkan dengan diskusi kelompok (*roundtable discussion*) berdasarkan bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Arab. Masing-masing kelompok terdiri dari 6-8 Anggota Parlemen dengan membahas satu pertanyaan kunci yang telah ditetapkan guna berbagi pandangan dan pengalaman, bukan kesepakatan. Masing-masing kelompok akan menunjuk seorang *rappporteur* yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kepada peserta.

Pertanyaan-pertanyaan kunci (*leading questions*) yang dibahas dalam *roundtable discussion* yaitu:

- A. Kondisi-kondisi apa saja bagi keterlibatan parlemen yang efektif dalam pencegahan konflik, rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian?
- B. Bagaimana kerjasama regional dapat mendukung stabilitas politik nasional?
- C. Bagaimana PBB dapat lebih efektif mencegah konflik, dan bagaimana PBB dapat lebih efektif melibatkan parlemen dalam pekerjaan pembangunan perdamaian?
- D. Apa yang dapat dilakukan khusus oleh perempuan untuk menyokong stabilitas jangka panjang?
- E. Bagaimana diplomasi antar parlemen dapat bekerja membantu mengembalikan perdamaian?
- F. Mekanisme apa yang dapat meningkatkan kerjasama antara partai-partai politik?
- G. Bagaimana para pelaku kekerasan politik dapat diminta pertanggungjawabannya?
- H. Bagaimana masyarakat paska-konflik dapat mencapai rekonsiliasi yang menyeluruh dan adil?
- I. Bagaimana parlemen dapat mempertahankan organisasi internasional bertanggungjawab terhadap hasil-hasil intervensinya?
- J. Bagaimana reformasi ekonomi, baik di tingkat nasional dan internasional, dapat mendukung rekonsiliasi?



Delegasi DPR-RI, Puan Maharani, sedang melakukan diskusi kelompok dengan Delegasi Thailand dan Delegasi Micronesia

Pada sesi *roundtable discussion*, Delegasi DPR-RI bergabung dengan Delegasi Thailand dan Delegasi Micronesia membahas topik H yaitu “Bagaimana masyarakat paska-konflik dapat mencapai rekonsiliasi yang menyeluruh dan adil?”, dan disepakati beberapa poin sebagai berikut:

- Keterlibatan semua aktor dan saling menerima satu sama lain
- Saling toleransi
- Keberadaan arbitrase yang netral
- Mengidentifikasi sebab-sebab dasar yang sesungguhnya
- Pendidikan sipil
- Peraturan hukum harus menerapkan kesetaraan semua pihak didepan hukum
- Mekanisme ekonomi yang dapat mewujudkan redistribusi kesejahteraan yang setara, termasuk perempuan, minoritas dan pemuda
- Penetapan kebutuhan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll)



Pada akhir sesi *roundtable discussion* dengan dipandu fasilitator Mr. Alessandro Motter (IPU Senior Adviser) dan Ms. Karin Riedl (IPU Consultant), masing-masing *rappporteur* menyampaikan hasil diskusi kelompoknya.

6. Sesi IV Summary of Findings

Sidang Sesi IV merupakan *general debate* dengan format “Doha Debate” yang dipopulerkan oleh BBC. Dibantu oleh moderator, dua pembicara mendukung “mosi” yang diperjuangkan dan dua pembicara lainnya menentang mosi tersebut. Para peserta sidang dapat turut serta secara aktif terlibat dalam perdebatan tersebut. Hasil perdebatan akan menghasilkan *Parliamentary Motion* yang bersifat tidak mengikat dan lebih ditujukan sebagai sarana untuk menggali berbagai aspek yang berguna bagi peserta sidang. Pertanyaan kunci yang dibahas untuk *Parliamentary Motion* adalah "Apakah penambahan keanggotaan khusus Dewan Keamanan PBB dapat membawa pada stabilitas global yang lebih besar?"

Dipandu moderator Mr. Bruno Stagno Ugarte, Executive Director of Security Council Report, ada empat pembicara yang diundang dalam debat yaitu:

1. Hon. Patrice Martin-Lalande, Anggota National Assembly of France/Anggota Advisory Group of the IPU Committee on United Nations Affairs
2. H.E. Mr. Eduardo Singh Puri, Permanent Representative of India di PBB
3. H.E. Mr. Eduardo Ulibarri, Permanent Representative of Costa Rica di PBB
4. Mr. Hans Corell, mantan USG Legal Affairs and Legal Counsel PBB

Pada akhir sesi, segmen pemungutan suara dibatalkan karena keputusan setuju dan tidak setuju terhadap mosi tersebut menjadi hak masing-masing negara peserta.

Sebelum Upacara Penutupan, dengan dipandu oleh fasilitator Mr. Martin Chungong, Deputy Secretary General IPU, para peserta diminta untuk melakukan *review of participants' input*, yaitu peninjauan ulang hasil-hasil diskusi kelompok, dan apabila tidak ada keberatan dari peserta maka ringkasan masukan peserta tersebut akan disampaikan kepada PBB agar ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut:

Bagaimana kerjasama regional dapat mendukung stabilitas politik nasional?

- Kerjasama haruslah untuk menghindari saling tumpang tindih, perlu merasionalisasi sumber-sumber dan berbagi pertanggungjawaban
- Organisasi harus membantu memperkuat parlemen khususnya di negara-negara transisi
- Mendorong IPU agar melanjutkan membangun jembatan antara parlemen dengan PBB

Bagaimana perempuan dapat menyokong pada stabilitas jangka panjang?

- Kaum pria harus mendukung peran dan nilai-nilai perempuan dalam resolusi/pencegahan konflik
- Perempuan harus diberdayakan agar berpartisipasi dalam proses politik (keterwakilan 30% merupakan target minimum namun beberapa peserta menyarankan separohnya)
- Dampak konflik terhadap perempuan dan anak-anak harus diukur (harus menjamin bahwa perempuan tidak dijadikan korban)

Bagaimana PBB dapat lebih efektif mencegah konflik, dan bagaimana PBB dapat lebih efektif mengajak parlemen dalam pekerjaan pembangunan perdamaian?

- PBB memerlukan mandat yang jelas dengan tujuan yang jelas dan diterima oleh semua pihak yang terlibat
- Pembangunan kemampuan lembaga-lembaga negara, termasuk dan khususnya parlemen (memperkuat kemandirian parlemen)
- Lembaga-lembaga negara harus berbagi informasi dengan PBB
- PBB perlu memperkuat organisasi-organisasi regional
- Komposisi Dewan Keamanan harus lebih representatif agar dapat memegang komando dengan kekuasaan yang lebih besar
- Masukan-masukan dari NGO dapat membantu menginformasikan intervensi PBB
- PBB harus membantu parlemen yang meminta bantuan

Bagaimana masyarakat paska-konflik dapat mencapai rekonsiliasi menyeluruh dan adil?

Prasyarat

- Keterlibatan semua aktor dan saling menerima satu sama lain
- Saling toleransi
- Keberadaan arbitrase yang netral
- Mengidentifikasi sebab-sebab dasar yang sesungguhnya

Langkah-langkah

- Memperkuat mekanisme kelembagaan, antara lain, melalui parlemen yang kredibel dan representatif, serta peradilan yang mandiri
- Mekanisme ekonomi yang dapat mewujudkan redistribusi kesejahteraan yang setara, termasuk perempuan, minoritas dan pemuda
- Penetapan kebutuhan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll)
- Perlu adanya keterlibatan yang lebih besar dari perempuan pada isu-isu nasional khususnya melalui akses ke pendidikan dan lebih banyak keterwakilan dalam badan-badan pembuat keputusan
- Pembentukan gerakan-gerakan keterwakilan
- Keberadaan media yang profesional dan majemuk yang memberikan akses yang setara kepada semua pihak (media yang bertanggungjawab)
- Berbagi proses dan kekuasaan politik
- Membangun masyarakat sipil agar dapat lebih berpartisipasi
- Pendidikan sipil
- Peraturan hukum harus menerapkan kesetaraan semua pihak didepan hukum
- Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi

Mekanisme apa yang dapat meningkatkan kerjasama antar partai politik?

- Peraturan dasar kebebasan untuk menciptakan partai politik, menerima peran oposisi
- Prosedur anggota parlemen harus memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, harus ada batas waktu, kekebalan parlemen
- Pembiayaan partai politik untuk memungkinkan partai politik berfungsi secara baik tidak hanya pada saat pemilihan umum saja
- Pihak Eksekutif harus melibatkan para pemimpin partai politik secara teratur
- Konsensus untuk bertingkah laku berwibawa di parlemen

Apa kondisi-kondisi untuk keterlibatan yang efektif dari parlemen dalam pencegahan konflik, rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian?

- Parlemen harus mewakili seluruh masyarakat, termasuk semua kelompok etnis
- Parlemen harus sah/legitimate (pemilihan yang adil dan bebas, dll)
- Parlemen harus terlibat dalam dialog dengan Eksekutif
- Parlemen harus dihargai dan dapat dihargai (integritas)
- Parlemen harus memiliki kemampuan memaksa

Pada akhir diskusi, para peserta diminta untuk mengisi *evaluation questionnaire* tentang format persidangan *Parliamentary Hearing* Tahun 2012 yang hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar pembuatan format persidangan *Parliamentary Hearing* Tahun 2013 dan selanjutnya.

7. Upacara penutupan sidang

Sidang ditutup pada tanggal 7 Desember 2012 pukul 17.00 oleh Presiden IPU, H.E. Abdelwahad Radi, dan Sekretaris Jenderal IPU, Mr. Anders B. Johnsson.



H.E. Abdelwahad Radi menyampaikan pidato penutupan yang berisi ucapan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal IPU menyampaikan bahwa *Parliamentary Hearing* Tahun 2012 menegaskan peran penting parlemen dalam pencegahan konflik, rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian, namun yang sangat diharapkan adalah peran aktif parlemen untuk bertindak dan mengambil langkah-langkah selanjutnya hingga perdamaian tersebut terwujud dan memeliharanya.

IV. LAIN-LAIN

Selain mengikuti agenda sidang tersebut diatas, Delegasi DPR-RI juga menghadiri acara-acara *social functions* yang diselenggarakan oleh Panitia seperti *Reception* maupun *Dinner/Luncheon* bersama PTRI New York.

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. *Parliamentary Hearing at the United Nations* Tahun 2012 telah berhasil diselenggarakan dengan lancar, aman dan sukses, dan dihadiri oleh kurang lebih 180 Anggota Parlemen, para pejabat tinggi PBB, para pakar, dan negara anggota lainnya.
2. *Parliamentary Hearing at the United Nations* tahun 2012 menghasilkan *Parliamentary Inputs* dan *Evaluasi Questionnaire* yang hasilnya akan disampaikan kepada PBB agar ditindaklanjuti.
3. Delegasi DPR-RI berpartisipasi aktif selama persidangan, antara lain mengikuti diskusi kelompok bersama dengan Delegasi Thailand dan Delegasi Micronesia yang membahas topik “Bagaimana masyarakat paska-konflik dapat mencapai rekonsiliasi yang menyeluruh dan adil?”, dan disepakati beberapa poin *Participant’s Input* sebagai berikut:
 - Keterlibatan semua aktor dan saling menerima satu sama lain
 - Saling toleransi
 - Keberadaan arbitrase yang netral

- Mengidentifikasi sebab-sebab dasar yang sesungguhnya
 - Pendidikan sipil
 - Peraturan hukum harus menerapkan kesetaraan semua pihak didepan hukum
 - Mekanisme ekonomi yang dapat mewujudkan redistribusi kesejahteraan yang setara, termasuk perempuan, minoritas dan pemuda
 - Penetapan kebutuhan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll)
4. Berkat upaya yang gigih dari Delegasi DPR-RI bekerjasama dengan Perwakilan Tetap Timor Leste di New York maka agenda Kasus III-Timor Leste dan presentasi video berhasil dibatalkan pembahasannya, dan sidang membahas kasus lainnya (Cote d'Ivoire).
 5. Hal-hal penting yang menjadi *highlight* dari hasil sidang *Parliamentary Hearing at the United Nations* Tahun 2012 yaitu:
 - a. Parlemen, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional, memainkan peran yang sangat penting dalam pencegahan konflik, rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian sehingga parlemen harus bertindak nyata dan menindaklanjuti hasil-hasil yang dicapai
 - b. PBB harus lebih banyak melibatkan parlemen nasional dan IPU dalam pencegahan konflik, rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian karena parlemen nasional dan IPU dapat membuka pintu dialog tidak hanya dengan Eksekutif namun juga dengan masyarakat luas yang tidak terjangkau oleh Eksekutif.
 - c. Organisasi internasional seperti PBB dan organisasi regional serta lembaga negara di tingkat nasional harus diperkuat, terutama lembaga yang terkait dengan ekonomi/pendanaan, agar dapat lebih terlibat dalam pencegahan konflik, rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian
 - d. Pencegahan konflik, rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian bukanlah rumusan ajaib namun merupakan konsep yang saling terkait satu sama lain dan memerlukan proses panjang serta sangat dipengaruhi oleh *political will* para pemimpin dan kondisi lingkungannya baik di tingkat nasional maupun internasional
 - e. Proses pencegahan konflik, rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian harus melibatkan peran serta perempuan minimal melalui keterwakilan paksa 30% di parlemen

B. SARAN

1. Mengingat pentingnya peran *Parliamentary Hearing* di PBB maka diharapkan DPR-RI terus aktif mengirim delegasi ke sidang dimaksud guna menyampaikan pandangan-pandangan DPR-RI dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dan mencegah pembahasan isu-isu yang dapat menyudutkan posisi Indonesia di dunia internasional.

2. Mengingat jadwal sidang *Parliamentary Hearing* yang sangat padat dan banyaknya topik-topik yang dibahas maka diharapkan Delegasi DPR-RI ke sidang dimaksud minimal terdiri dari 3 orang Anggota sesuai keterwakilan Fraksi, dan dapat ditambah Pimpinan DPR-RI apabila topik yang dibahas sangat krusial.

C. CATATAN

1. Model *Parliamentary Hearing* tahun 2012 sebagai berikut:
 - a- *Sitting arrangement* berbentuk *classroom* dan masing-masing meja diberikan angka 1 s.d. seterusnya
 - b- tidak disediakan deskplate dan table flag maupun indoor flag
 - c- masing-masing peserta bebas memilih tempat berdasarkan kelompok bahasa English, French, Spain, Arabic
 - d- identitas negara peserta berupa angka yang dapat diganti-ganti berdasarkan tempat duduk
 - e- terdapat panggung tanpa backdrop untuk pembicara
 - f- persidangan dengan model wawancara dan tanya jawab serta diskusi interaktif dari para peserta maupun diskusi kelompok
 - g- diskusi kelompok (*roundtable discussion*) sesuai bahasa membahas sebuah topik dan menunjuk seorang rapporteur
 - h- *booth interpreter* yang disediakan hanya Inggris, Perancis, Spanyol, Arab. Tidak tersedia *booth interpreter* untuk bahasa Indonesia
2. *Parliamentary Hearing* tahun 2012 akan menjadi model bagi persidangan *Parliamentary Hearing* tahun 2013 maupun di tahun-tahun mendatang,

D. LAMPIRAN

(Dokumen tertulis yang tersedia selama persidangan dan bahan-bahan pendukung)

Ucapan terima kasih diberikan kepada Duta Besar/Perwakilan Tetap Republik Indonesia beserta jajarannya di PTRI New York atas dukungan dan bantuan yang diberikan selama Delegasi DPR-RI mengikuti persidangan maupun selama berada di New York.

Demikin Laporan Delegasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

a.n. Delegasi DPR-RI
KETUA,

TTD

Ir. H. Roestanto Wahidi Dj
A-467

Annual UN Parliamentary Hearing
A road less travelled:
Parliamentary approaches to conflict prevention, reconciliation and peace building
New York, 6-7 December 2012

PARLIAMENTARY INPUTS

How can regional cooperation support national political stability?

- Cooperation has to avoid overlap, it needs to rationalize resources, and share accountability
- Organizations must help strengthen parliament especially in transitioning countries
- Encourage the IPU to continue to build a bridge between parliaments and the UN

What can women specifically contribute to long-term stability?

- Men should be supportive of women's values and role in conflict prevention/resolution
- Women must be empowered to participate in the political process (30% representation is minimum objective but some suggest partly)
- The impact of conflict on women and children should be assessed (must ensure that women will not be victimized)

How can the UN more effectively prevent conflict, and how can the UN more effectively engage parliaments in its peace building work?

- UN needs a clear mandate with clear aim accepted by all stakeholders
- Building of the capacity of state institutions, including and especially parliament (strengthen the independence of parliament)
- State institutions have to share information with UN
- UN needs to strengthen regional organizations
- The composition of the Security Council has to be more representative in order to command more authority
- Greater input from NGOs can help inform the UN intervention
- UN should assist parliaments that request assistance

How can post-conflict society achieve just and inclusive reconciliation?

Preconditions

- Involvement of all actors and acceptance of each other
- Mutual tolerance
- Existence of neutral arbitration
- Identification of real root causes

Measures

- Strengthening institutional mechanism, inter alia, through a representative and credible parliament, as well as an independent judiciary
- Economic mechanism that allow for the equitable redistribution of wealth, including among women, minorities, and youth
- Provision of basic social needs (education, health, jobs, etc)
- Need for greater involvement of women in national issues in particular through access to education and more representation in decision-making bodies
- Establishment of representative movements
- Existence of plural and professional media which gives equitable access to all (media to be responsible)
- Share political power and process
- Build civil society to ensure more participation
- Civic education
- Rule of law must apply equality of all before the law
- Truth and reconciliation commissions

What mechanism can enhance cooperation among political parties?

- Basic rules freedom to create political parties, accept the role of the opposition
- Procedure parliamentarians should have right to ask questions, there should be time limits, parliamentary immunity
- Political parties financing to allow political parties to function properly not only during the election cycle
- Executive should engage with political party leaders on regular basis
- Consensus on courteous behavior within the assembly

What are the conditions for effective parliamentary involvement in conflict prevention, reconciliation, and peace-building?

- Parliaments should be representative of the entire society, including all ethnic groups
- Parliament should be legitimate (free and faire elections, etc)
- Parliament should be involved in dialogue with the executive
- Parliament has to be respected and respectable (integrity)
- Parliament should have the requisite capacities

Annual UN Parliamentary Hearing
A road less travelled:
Parliamentary approaches to conflict prevention, reconciliation and peace building
New York, 6-7 December 2012

DAFTAR ISI LAMPIRAN

1. Surat Undangan dari Presiden IPU, H.E. Mr. Abdelwahab Radi, dan Presiden Sidang Umum ke-67 PBB tertanggal 1 Oktober 2012
2. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik untuk Menghadiri Parliamentary Hearing at the United Nations
3. Provisional Programme
4. About the Moderators
5. Hand-out Kenya : Conflict prevention through constitutional and institutional reform
6. Hand-out Sierra Leone : Reconciliation through inclusive and accountable leadership
7. Hand-out Timor Leste: peace building through national and international cooperation
8. Working sheet untuk roundtable discussion
Bahan –bahan masukan
A. Bahan dari PTRI New York
B. Bahan dari KEMLU RI
9. C. Bahan dari Tenaga Ahli BKSAP
10. Resolution adopted by the General Assembly
66/261. Interaction between the United Nations, national parliaments and the Inter-parliamentary Union
11. Information Note
12. Registration Form